

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2019

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

PPID BANWASLU KEPRI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanjungpinang, 06 Pebruari 2020

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yessi Yunius, SE, M.Si

NIP 19680321 199703 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.2 Belanja	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.3 Persediaan	
C.4 Peralatan dan Mesin	
C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.7 Aset Lain-lain	
C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.9 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.10 Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.11 Ekuitas	
C.12 Catatan Penting Lainnya neraca	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5 Transaksi Antar Entitas	
E.6 Ekuitas Akhir	
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI. Lampiran dan Daftar	

PPID BAWASLU KEPRI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjungpinang, 06 Pebruari 2020

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yessi Yunius, SE, M.Si

NIP 19680321 199703 2 003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Catatan	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	3.746.125	-	55.506.231
JUMLAH PENDAPATAN		-	3.746.125	-	55.506.231
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	13.790.534.000	5.901.813.750	42,80	1.293.531.766
Belanja Barang	B.4	72.721.825.000	64.902.742.424	89,25	62.442.345.061
Belanja Modal	B.5	2.905.926.000	2.837.064.117	97,63	4.032.829.455
JUMLAH BELANJA		89.418.285.000	73.641.620.291	82,36	67.768.706.282
SURPLUS/DEFISIT		(89.418.285.000)	(73.637.874.166)		(67.713.200.051)

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

U R A I A N	Catatan	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	744.717.556	20.200.586
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	2.295.788.000	3.357.794.000
Persediaan	C.3	5.630.500	697.000
Jumlah Aset Lancar		3.046.136.056	3.378.691.586
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	8.807.294.971	6.104.970.854
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	8.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(3.588.279.573)	(2.157.188.096)
Jumlah Aset Tetap		5.227.015.398	3.955.782.758
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.7	9.000.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(9.000.000)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		8.273.151.454	7.334.474.344
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	7.041.067	7.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.10	-	20.200.586
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.041.067	27.200.586
JUMLAH KEWAJIBAN		7.041.067	27.200.586
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	8.266.110.387	7.307.273.758
JUMLAH EKUITAS		8.266.110.387	7.307.273.758
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.273.151.454	7.334.474.344

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	266.013	193.975
Jumlah Pendapatan		266.013	193.975
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	5.901.813.750	1.293.531.766
Beban Persediaan	D.3	330.171.159	46.372.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	39.747.134.599	40.808.638.075
Beban Pemeliharaan	D.5	743.661.490	1.129.351.405
Beban Perjalanan Dinas	D.6	25.344.236.869	17.178.817.890
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.440.091.477	638.542.534
Jumlah Beban		73.507.109.344	61.095.254.170
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(73.506.843.331)	(61.095.060.195)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	92.354.251	60.479.256
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		92.354.251	60.479.256
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(73.414.489.080)	(61.034.580.939)
Pos Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT - LO		(73.414.489.080)	(61.034.580.939)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	7.307.273.758	3.365.400.237
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(73.414.489.080)	(61.034.580.939)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(9.000.000)	(702.044.633)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.41	(9.000.000)	-
Koreksi Lain-Lain	E.42	-	(702.044.633)
Jumlah		(9.000.000)	(702.044.633)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	74.382.325.709	65.678.499.093
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		958.836.629	3.941.873.521
EKUITAS AKHIR	E.6	8.266.110.387	7.307.273.758

PPID BAWASLU KEPRI

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.746.125 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.746.125 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp73.641.620.291 atau mencapai 82,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp89.418.285.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.273.151.454 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.046.136.056; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.227.015.398 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.041.067 dan Rp8.266.110.387

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp266.013 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp73.507.109.344 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-73.506.843.331, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp92.354.251 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-73.414.489.080.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp7.307.273.758, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-73.414.489.080 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -9.000.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 74.382.325.709 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp8.266.110.387

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PPID BAWASLU KEPRI

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2019	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	13.790.534.000	13.790.534.000
Belanja Barang	70.128.434.000	72.721.825.000
Belanja Modal	2.905.926.000	2.905.926.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	86.824.894.000	89.418.285.000

Realisasi Pendapatan
Rp3.746.125

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.746.125 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.746.125 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	3.746.125	-
Jumlah	-	3.746.125	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 93,25 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.746.125	55.506.231	(93,25)
Jumlah	3.746.125	55.506.231	(93,25)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.746.125 dan Rp55.506.231. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2019 mengalami penurunan sebesar 93,25 dari TA 2018 Karena PNBPN pada TA.2019 berasal dari setoran pengembalian belanja tahun 2018 berupa uang makan PPNPNS dan kelebihan atas pengajuan LS SPPD sedangkan PNBPN pada TA.2018 berasal dari pajak kegiatan yang belum disetor oleh Bawaslu Kab/Kota pada tahun 2017 dan disetorkan pada awal Tahun 2018. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.746.125	55.506.231	(93,25)
Jumlah	3.746.125	55.506.231	(93,25)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	193.975	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56	769.626	(99,99)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.746.069	54.542.630	(93,13)
	-	-	-
Jumlah	3.746.125	55.506.231	(93,25)

B.2 Belanja

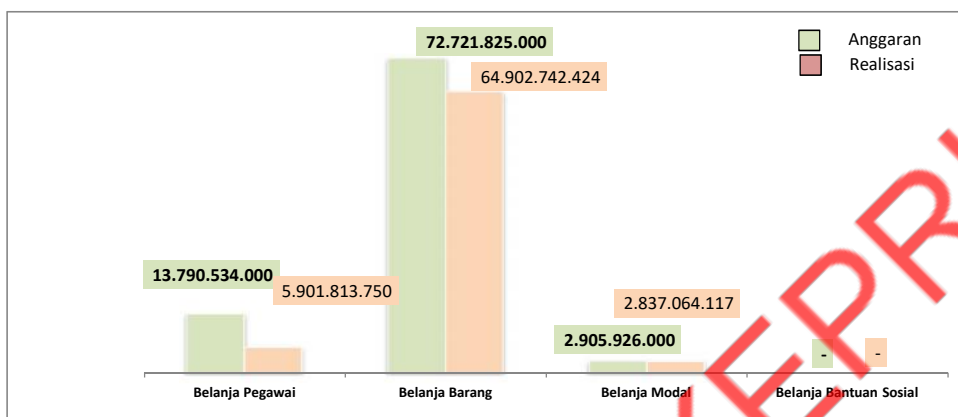
Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp73.641.620.291 atau 82,36 % dari anggaran belanja sebesar Rp.89.418.285.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2019

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg
Belanja Pegawai	13.790.534.000	5.901.813.750	42,80
Belanja Barang	72.721.825.000	64.902.742.424	89,25
Belanja Modal	2.905.926.000	2.837.064.117	97,63
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	89.418.285.000	73.641.620.291	82,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2019



Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,67% karena perubahan jenis belanja pegawai Uang Kehormatan 7 Bawaslu Kab/Kota se-Kepulauan Riau yang sebelumnya belanja barang menjadi belanja pegawai di TA.2019, adanya kenaikan Gaji Pokok PNS, penambahan CPNS sebanyak 6 (Enam) orang, serta penambahan anggaran untuk melaksanakan pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019 dan penambahan anggaran berupa Dana Hibah pada akhir tahun 2019 untuk melaksanakan Persiapan Pilkada 2020 sehingga Barang Non Operasional, Barang persediaan, dan Perjalanan Dinas dalam Negeri mengalami kenaikan.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2019 dan TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Pegawai	5.901.813.750	1.293.531.766	356,26
Belanja Barang	64.902.742.424	62.442.345.061	3,94
Belanja Modal	2.837.064.117	4.032.829.455	(29,65)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	73.641.620.291	67.768.706.282	8,67

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.901.813.750 dan Rp1.293.531.766. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 356,26 % dari TA 2018. Hal ini disebabkan Karena adanya perubahan jenis belanja pegawai Uang Kehormatan 7 Bawaslu Kab/Kota se-Kepulauan Riau yang sebelumnya belanja barang menjadi belanja pegawai di TA.2019, adanya kenaikan Gaji Pokok PNS serta penambahan CPNS sebanyak 6 (Enam) orang.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Gaji Pokok PNS	172.381.040	35.476.000	385,91
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.910	272	969,85
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12.659.096	3.547.600	256,84
Belanja Tunj. Anak PNS	1.871.638	202.720	823,26
Belanja Tunj. Struktural PNS	38.700.000	37.440.000	3,37
Belanja Tunj. PPh PNS	38.787.011	21.420.326	81,08
Belanja Tunj. Beras PNS	10.790.580	2.027.760	432,14
Belanja Uang Makan PNS	120.803.000	33.944.000	255,89
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	14.190.000	2.590.000	447,88
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.808.764.700	852.350.000	464,18
Belanja Uang Lembur	42.771.000	12.955.000	230,15
Jumlah Belanja kotor	5.903.726.586	1.293.531.766	356,40
Pengembalian Belanja Pegawai	1.912.836	-	-
Jumlah Belanja	5.901.813.750	1.293.531.766	356,26

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp64.902.742.424 dan Rp62.442.345.061. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,94% dari Realisasi TA 2018.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Karena adanya penambahan anggaran untuk melaksanakan pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019 dan penambahan anggaran berupa Dana Hibah pada akhir tahun 2019 untuk melaksanakan Persiapan Pilkada 2020 sehingga Barang Non Operasional, Barang persediaan, dan Perjalanan Dinas dalam Negeri mengalami kenaikan.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Barang Operasional	22.731.597.880	23.906.531.001	(4,91)
Belanja Barang Non Operasional	7.082.150.178	5.253.447.212	34,81
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	246.496.533	39.452.000	524,80
Belanja Jasa	8.767.073.224	14.956.678.253	(41,38)
Belanja Pemeliharaan	743.661.490	1.129.201.405	(34,14)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	25.575.837.078	17.221.840.390	48,51
Jumlah Belanja Kotor	65.146.816.383	62.507.150.261	4,22
Pengembalian Belanja	244.073.959	64.805.200	276,63
Jumlah Belanja	64.902.742.424	62.442.345.061	3,94

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.837.064.117 dan Rp4.032.829.455. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 29,65% dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh kebutuhan unit barang pada tahun 2019 tidak terlalu banyak dan sedangkan pada tahun 2018 ada biaya pengadaan kendaraan roda 4.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.798.064.117	4.032.829.455	(30,62)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.000.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.837.064.117	4.032.829.455	(29,65)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.837.064.117	4.032.829.455	(29,65)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.798.064.117 dan Rp4.032.829.455, mengalami penurunan sebesar 30,62 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin lebih rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.798.064.117	4.032.829.455	(30,62)
Jumlah Belanja Kotor	2.798.064.117	4.032.829.455	(30,62)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.798.064.117	4.032.829.455	(30,62)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.000.000 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2018. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama periode Semester II Tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya. Belanja Modal gedung dan bangunan berupa Papan nama Bawaslu..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.000.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	39.000.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	39.000.000	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp744.717.556

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp744.717.556 dan Rp20.200.586. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Kas Hibah Bawaslu Provinsi Kepri, Kab/Kota	744.451.543,00	-
Jasa Giro	266.013,00	-
Jumlah	744.717.556	-

Penjelasan lebih lanjut Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp2.295.788.000

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.295.788.000 dan Rp3.357.794.000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

Keterangan	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2.295.788.000,00	3.357.794.000,00
Jumlah	2.295.788.000	3.357.794.000

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut :

PPID BAWASLU KEPRI

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp5.630.500

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5.630.500 dan Rp697.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

Jenis	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018
Barang Konsumsi	5.630.500	697.000
Jumlah	5.630.500	697.000

Persediaan tersebut di atas dalam dalam kondisi baik.

Peralatan dan Mesin
Rp8.807.294.971

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp8.807.294.971 dan Rp6.104.970.854. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019	6.104.970.854
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.720.324.117
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	156.897.000
Mutasi Kurang:	
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	165.897.000
Koreksi Pencatatan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2019	8.816.294.971
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(3.582.412.906)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5.233.882.065

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin selama periode Semester II Tahun 2019 berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2,720,324,117 dan reklasifikasi masuk barang sebesar Rp. 156,897,000 yang disebabkan kesalahan penginputan kodefikasi Peralatan dan Mesin di Aplikasi Simak BMN dan Kesalahan pada Kontrak pengadaan Bawaslu Kota Batam.

PPID BAWASLU KEPRI

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin selama periode Semester II Tahun 2019 berasal dari reklasifikasi keluar, yang dilakukan untuk perbaikan kodefikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 165.897.000. Terdapat perbedaan antara Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar senilai Rp. 9.000,000, dikarenakan BMN yang diinput pada Reklasifikasi Masuk terbagi menjadi barang Intrakomptabel Rp. 156,897,000 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp. 9,000,000 yang tidak tercatat di dalam Neraca. Barang Ekstrakomptabel berupa Kursi Besi/Metal sebanyak 10 unit.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp8.000.000

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.8.000.000 dan Rp.8.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2019	8.000.000
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	8.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(5.866.667)
Nilai Buku per	2.133.333

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode semester II tahun 2019

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode semester II tahun 2019

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

PPID BAWASLU KEPRI

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.588.279.573

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp3.588.279.573 dan Rp2.157.188.096. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2019

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.807.294.971	(3.582.412.906)	5.224.882.065
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000	(5.866.667)	2.133.333
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		8.815.294.971	(3.588.279.573)	5.227.015.398

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Lain-lain
Rp9.000.000

C.7 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp9.000.000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2019	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 31 Desember 2019	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	(9.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	(9.000.000)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

Mutasi Kurang

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 9.000.000

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp9.000.000 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	9.000.000	(9.000.000)	-
-	-	-	-
Total	9.000.000	(9.000.000)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp7.041.067

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp7.041.067 dan Rp7.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	7.041.067	7.000.000
	-	-
Total	7.041.067	7.000.000

Ekuitas Rp8.266.110.387

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.266.110.387. dan Rp7.307.273.758. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp266.013

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp266.013 dan Rp193.975. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	266.013	193.975,00	37
Jumlah	266.013,00	193.975,00	-

Beban Pegawai
Rp5.901.813.750

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.901.813.750 dan Rp1.293.531.766.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar 356,26 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Pada Semester II Tahun Anggaran 2019, realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan semester II tahun sebelumnya, adanya perubahan jenis belanja pegawai Uang Kehormatan 7 Bawaslu Kab/Kota se-Kepulauan Riau yang sebelumnya belanja barang menjadi belanja pegawai di TA.2019, adanya kenaikan Gaji Pokok PNS, serta penambahan CPNS sebanyak 6 (Enam) orang. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Gaji Pokok PNS	172.381.040	35.476.000	385,91
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.506	272	821,32
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	12.659.096	3.547.600	256,84
Beban Tunj. Anak PNS	1.871.638	202.720	823,26
Beban Tunj. Struktural PNS	38.700.000	37.440.000	3,37
Beban Tunj. PPh PNS	38.787.011	21.420.326	81,08
Beban Tunj. Beras PNS	10.790.580	2.027.760	432,14
Beban Uang Makan PNS	120.803.000	33.944.000	255,89
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	13.820.000	2.590.000	433,59
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.808.764.700	852.350.000	464,18
Beban Uang Lembur	42.771.000	12.955.000	230,15
Jumlah	5.901.813.750	1.293.531.766	356,26

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp330.171.159 dan Rp46.372.500

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 612,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Peningkatan beban persediaan disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Persediaan konsumsi	330.171.159	46.372.500	612,00
	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	330.171.159,00	46.372.500	612,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.747.134.599 dan Rp40.808.638.075.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Pada Semester II Tahun 2019, terjadi penurunan pagu atas belanja barang dan jasa. Beban Barang Non Operasional Lainnya yaitu Pembayaran Uang Santunan Kecelakaan PTPS di Kabupaten Natuna sebesar Rp. 8.250.000,-, Biaya Pelatihan Latsar untuk 5 orang CPNS Strata 1 sebesar Rp.46.480.000,-, Biaya Pelatihan Latsar untuk 1 orang CPNS D3 sebesar Rp.9.296.000,-, serta biaya pemeliharaan inventaris kantor seperti service AC dan Scanner sebesar Rp.8.430.500,-. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Keperluan Perkantoran	19.852.381.380	22.690.823.836	(12,51)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	586.930.000	925.944.500	(36,61)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.283.802.750	287.868.665	693,35
Beban Bahan	5.491.033.678	3.981.301.513	37,92
Beban Honor Output Kegiatan	1.514.670.000	1.219.629.999	24,19
Beban Barang Non Operasional Lainnya	72.456.500	38.000.000	90,68
Beban Langganan Listrik	429.852.498	491.378.155	(12,52)
Beban Langganan Telepon	137.195.612	312.906.562	(56,15)
Beban Langganan Air	105.282.281	130.531.826	(19,34)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	54.300.000	(100,00)
Beban Jasa Pos dan Giro	4.755.400	2.950.500	61,17
Beban Sewa	6.533.047.000	8.328.843.407	(21,56)
Beban Jasa Profesi	1.974.050.000	2.233.830.000	(11,63)
	-	-	-
Jumlah	39.747.134.599	40.808.638.075,00	(2,60)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp743.661.490 dan Rp1.129.351.405.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 34,15 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait pemeliharaan peralatan dan mesin yang tidak terlalu besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	421.803.126	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	743.661.490	707.398.279	5,13
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	150.000	(100,00)
Jumlah	743.661.490	1.129.351.405	(34,15)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.344.236.869 dan Rp17.178.817.890

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 47,53 persen disebabkan oleh Peningkatan beban perjalanan dinas dikarenakan bertambahnya intensitas perjalanan dinas di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu 2019, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Perjalanan Biasa	12.103.969.138	6.157.592.709	96,57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.367.383.995	4.211.023.449	3,71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.086.195.331	6.089.698.962	32,78
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	786.688.405	720.502.770	9,19
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	25.344.236.869,00	17.178.817.890	47,53

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.440.091.477

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.440.091.477 dan Rp638.542.534.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.439.558.143	638.009.200	125,63
Beban Penyusutan Jaringan	533.334	533.334	-
Jumlah Penyusutan	1.440.091.477	638.542.534	125,53
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.440.091.477	638.542.534	125,53

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp92.354.251

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp92.354.251 dan Rp60.479.256.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2018	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56	769.626,00	(99,99)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.746.069	54.542.630,00	(93,13)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	99.794.446	5.167.000,00	1.831,38
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(11.186.320)	-	-
	-	-	-
Jumlah	92.354.251,00	60.479.256	52,70

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7.307.273.758,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.7.307.273.758,00 dan Rp.3.365.400.237,00

Defisit LO Rp-
73.414.489.080,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.-73.414.489.080,00 dan Rp.-61.034.580.939,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.-9.000.000 dan Rp.-702.044.633 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.-9.000.000 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi Aset Lainnya yaitu reklasifikasi dari Ekstrakomtable berupa kursi besi/metal berjumlah 10 unit

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(9.000.000)
	-
Jumlah	(9.000.000,0)

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2019

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-702.044.633. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2019

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.74.382.325.709 dan Rp.65.678.499.093. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2019

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	71.759.649.834
Diterima dari Entitas Lain	(3.746.125)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	2.626.422.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	74.382.325.709

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DKEL sebesar Rp 71.759.649.834, sedangkan DDEL sebesar Rp 3.746.125

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2019

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 1.881.970.457 dari total Rp2.626.422.000 yang akan diterima sepanjang tahun 2019

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Uang	700.447.019
Pemerintah Kabupaten Bintan	Uang	341.407.550
Pemerintah Kota Batam	Uang	159.886.211
Pemerintah Kabupaten Karimun	Uang	161.489.685
Pemerintah Kabupaten Lingga	Uang	254.151.931
Pemerintah Kabupaten Kepulauan	Uang	109.329.061
Pemerintah Kabupaten Natuna	Uang	155.259.000
Total Pengesahan		1.881.970.457,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		1.881.970.457

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp8.266.110.387*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.8.266.110.387,00 dan Rp.7.307.273.758,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 10 Januari 2020 dibayarkan tagihan listrik bulan desember tahun 2019 sebesar Rp.6.222.931,- dan tagihan Telepon, Internet sebesar Rp.818.136. Setoran Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Karimun, Bawaslu Kabupaten Lingga dan Bawaslu Kabupaten Natuna pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.166.013,- dan Setoran awal sebesar Rp.100.000,- Bawaslu Kabupaten Lingga

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

PPID BAWASLU KEPRI